RENJA

RENCANA KERJA

2022

DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 ini dapat disusun.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2022 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program. Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menuju good governance yang tercermin dalam visi Bupati Halmahera Utara yang telah ditetapkan, yaitu : ***"Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan"***

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan sehingga dapat di tetapkan sebagai rencana kerja 2022.

Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dapat memenuhi konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Plt. Kepala Dinas,

Victor O. Mangimnulude.ST
Pembina / IVa
NIP. 19711021 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas kelautan dan Perikanan 16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ... 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2. Tujuan dan Sarsaran Renja Dinas kelautan dan Perikanan 26
3.3. Program dan Kegiatan 26

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 31

BAB V. PENUTUP 34

LAMPIRAN 35

RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui perencanaan yang matang diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terencana, lebih berkualitas serta tepat sasaran sesuai dengan target perencanaan serta memberikan hasil yang memuaskan. Penyusunan perencanaan pembangunan berpedoman pada undang-undang dan peraturan sebagai dasar hukum dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis.

Rencana Kerja sebagai langkah operasional dari perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang dijabarkan tahunan antara lain dalam penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target sesuai program, kebijakan dan sasaran yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kebutuhan riil masyarakat melalui hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2022, serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Halmahera Utara, pemerintah provinsi Maluku utara dan pemerintah pusat. Renja disusun melalui tahapan persiapan penyusunan berupa pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusunan rancangan Renja berupa perumusan rancangan dan penyajian dan pembahasan rancangan, serta penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, rencana lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan penganggaran pada tahun 2022.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dalam merumuskan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif mengacu pada RKPD Kabupaten Halmahera Utara. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pagu pendanaan serta perkiraan maju. Selain mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah (5 tahun) dalam pembangunan bidang kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara juga disinkronkan dengan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengacu pada kebijakan, program Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Selain itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 harus selaras dengan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara. (tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (ditambahkan)
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 18 Tahun 2016, (ditmbahkan)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (ditambahkan)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 (ditambahkan)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (ditambahkan)
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 (ditambahkan)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (ditambahakan)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 (ditambahakan)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021 (ditambahakan)
12. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 46 Tahun 2016 (ditambahakan)
13. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2021 (ditambahakan)
14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 (ditambahakan)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 merupakan penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tahun anggaran 2022. untuk memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja dan pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 antara lain adalah :

- Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022.
- Untuk meningkatkan sinergitas dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat terlaksana lebih efektif, efisien dan mengakomodir semua aspirasi masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III Tujuan DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelutan dan Perikanan
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Kondisi Kinerja

Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi sumber daya alam meliputi sumberdaya daratan dan lautan. Pengelolaan potensi sumberdaya alam hendaknya dilakukan dengan bijak, aman, lestari dan berkesinambungan. Pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan benar diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah salah satunya di sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi di sektor kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya air laut, air tawar dan air payau, pengolahan ikan, serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir.

Indikator kinerja pada sektor kelautan dan perikanan dapat diukur melalui produksi yang dicapai tiap tahunnya dibandingkan dengan target. Produksi perikanan Tahun 2019 berjumlah 33.713 ton yang meliputi perikanan tangkap sebesar 33.375 ton dan perikanan budidaya sebesar 338 ton.

Realisasi jumlah produksi perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 sebanyak 30.442 ton dari produksi tangkap sebanyak 23.364 ton dan produksi budidaya sebanyak 374 ton. dari target yang ditetapkan yang terdiri dari produksi tangkap sebanyak 30.000 ton dan produksi budidaya sebanyak 442,3 ton.

a) Realisasi Produksi perikanan tahun 2020 sebesar ton, dari target produksi perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 sebesar 23.738 ton, maka persentase produksi perikanan yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 77,97% Dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2020 maka produksi perikanan tahun 2020 mengalami penurunan dari target RPJMD yaitu sebesar 30.000 ton. Adapun produksi perikanan terbagi atas produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, sebagai berikut :

1. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2020

   sebesar 374 ton, dari target produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 442 ton, maka persentase produksi perikanan budidaya tahun 2019 adalah :

   (374 ton / 442 ton) x 100% = 0,84%.

   Dari hasil tersebut maka produksi perikanan budidaya tahun 2020 mengalami penurunan dari target RPJMD. Adapun produksi perikanan budidaya terdiri Produksi Budidaya Air Tawar sebesar ton 374 ton

2. Produksi Perikanan Tangkap

   Produksi Perikanan Tangkap tahun 2020 sebesar 30.000 ton, sedangkan target produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 23.364 ton, maka persentase produksi perikanan tangkap tahun 2020 adalah : (30.000 ton / 23.364 ton) x 100% = 0,77%

b) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD dengan indikator kinerja produksi perikanan adalah :

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan :
  - Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan Sarana Prasarana Pembudidaya)
  - Operasional UPTD Perbenihan Ikan Air Laut
  - Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Tawar
  - Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya UPTD)
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :
  - Pengembangan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan
- Program pengembangan sumber daya manusia kelautan perikanan
  - Pendampingan Nelayan Kecil
  - Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil

c) Masalah yang dihadapi dalam Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan tahun 2020 ini dengan adalah Adanya penyebaran wabah virus Covid 19 yang berpengaruh pada aktivitas keluar rumah, sehingga produksi mengalami penurunan. Kendala lainnya adalah kurangnya pakan dan

modal usaha serta masih kurangnya pemahaman secara teknis dalam pengembangan usaha Budidaya Air Tawar dan Payau dan penggunaaann sarana prasarana tangkap perikanan.

d) Solusi dari permasalahan dimaksud adalah perlu adanya penanganan kebijakan covid 19 sehingga berkurangnya pembatasan aktivitas, dan akan dapat terlaksananya peningkatan produksi dan pengembangan sarpras di bidang budidaya dan tangkap, pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur dan pembudidaya laut dan darat, penambahan modal usaha serta pangsa pasar yang menunjang produksi perikanan.

1) Konsumsi Ikan

a) Konsumsi Ikan tahun 2020 sebesar 49,10 Kg/Kapita/Thn, sedangkan target Konsumsi Ikan tahun 2020 sebesar 52.50 Kg/Kapita/Thn, maka persentase Konsumsi Ikan tahun 2020 adalah: (52,50 Kg/Kapita/Thn / 49,10 Kg/Kapita/Thn) x 100% = 107,33% .

Dibandingkan dengan target di RPJMD pada tahun 2020 maka realisasi Konsumsi Ikan tahun 2020 lebih tinggi dari target RPJMD 2020. Pencapaian melebihi target dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan dan tersedianya sarana usaha pendinginan dan pembekuan ikan(coldstore) yang meningkatkan mutu dan hasil ikan.

b) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD dengan indikator kinerja Konsumsi Ikan

- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan kegiatan :
  - ❖ Penguatan dan Pengembangan Pemasaran lokal Hasil Perikanan
  - ❖ Sosialisasi Gemar Ikan dan Lomba Cipta Menu Perikanan

c) Masalah yang dihadapi oleh unit-unit pengolahan ikan adalah keterbatasan modal usaha untuk pengadaan sarana dan prasarana/ peralatan pengolahan serta pengadaan bahan baku pengolahan. Juga masalah dalam konsumsi ikan masyarakat adalah bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat relatif masih rendah dibandingkan dengan

negara lain. Namun jika melihat target RPJMD dengan realisasi tahun 2020 maka realisasi konsumsi ikan lebih tinggi daripada target RPJMD.

d) Solusi yang harus dilakukan untuk permasalahan dimaksud adalah dengan menyediakan unit – unit pengolahan hasil perikanan bagi kelompok pengolah yang lebih memadai.

Pada tahun 2020 produksi sebesar 23.738 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 23.364 ton dan budidaya sebesar 374 ton. Tahun 2020 mengalami penurunan produksi, ini disebabkan oleh selain adanya pandemi Virus Corona, penurunan karena intensitas dan kualitas sosialisasi dan pembinaan teknis dan kelembagaan sektor perikanan dan kelautan yang tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, penyaluran stimulan produksi perikanan antara lain sarana dan prasarana budidaya, serta sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil ikan, kemudian melalui penyediaan alokasi anggaran statistik sebagai penunjang proses pengolahan data statistik sehingga validasi data perikanan dan kelautan tidak dapat terlaksana secara periodik dan kualitas data statistik bidang kelautan dan perikanan belum dapat secara optimal dipertanggungjawabkan. Penurunan Produksi perikanan ini disebabkan juga karena kurangnya pembinaan dan pendampingan nelayan dan pembudidaya ikan serta pengembangan sarana perikanan tangkap dan budidaya.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum. Potensi perikanan laut terdapat di 13 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara, Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo, Tobelo Utara, Galela, Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan. Sentra perikanan tangkap berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Kecamatan Tobelo dan Tobelo Selatan.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari budidaya ikan di air tawar, budidaya ikan di air payau/tambak dan budidaya ikan di air laut. Potensi budidaya ikan di air tawar menyebar di wilayah Kecamatan Kao Barat, Tobelo Barat, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Galela, Galela Selatan dan Galela Utara dengan komoditas utama jenis ikan nila dan ikan mas. Usaha budidaya ikan air tawar banyak dilakukan di kolam, Keramba Tancap, dan Keramba Jaring Apung

(KJA). Budidaya ikan air payau dilakukan di tambak terdapat di Kecamatan Kao, dan Kecamatan Galela dengan komoditas udang dan ikan bandeng sedangkan budidaya laut terdapat di kecamatan Kao, Kao Utara, Tobelo Timur, Tobelo, Tobelo utara dan Loloda kepulauan.

Produksi ikan olahan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2019 naik sangat signifikan. Dari target 280 ton naik menjadi 1034 ton atau naik sebesar 730,48 %. Tersedianya sarana pengolahan berupa 2 unit coldstorage dengan kapasitas 50 ton, juga bantuan sarana pengolahan kepada masyarakat berupa sarana rumah pengasapan merupakan penunjang peningkatan produk olahan tahun 2019. Pada tahun 2020 produksi pengolahan hasil perikanan juga meningkat dari target yang 1000 ton menjadi 1100 ton atau naik 110% dari target.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran peningkatan gizi keluarga adalah melalui promosi gemar makan ikan. Indikator keberhasilan dalam jangka panjang adalah meningkatnya konsumsi ikan masyarakat .Pada tahun 2019 Tingkat konsumsi ikan masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara mencapai 49,61 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2020 konsumsi ikan/kapita/tahun di kabupaten Halmahera Utara adalah 52.4 kg/kapita/tahun atau naik 113,2 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Indikator kinerja dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu meliputi program/kegiatan bersifat rutin.

Program/kegiatan pembangunan tahun 2020 meliputi :

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidaya)
2) Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut.
3) Operasional UPTD BBIL Kusuri

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan.
2) Sosialisasi "Gemar Ikan" dan Lomba Cipta Menu Perikanan

Pada tahun 2022 program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
2) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;

d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
2) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
3) Pengelola pembudidaya ikan.

e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1) Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
2) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
3) Penyediaan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Review terhadap pelaksanaan program pada Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Review terhadap Pelaksanaan Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja.

Pada tahun 2020 secara keseluruhan program kegiatan tidak memenuhi target kinerja (tingkat capaian program 100%) yaitu program-program yang bersifat rutin yaitu Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program pengelolaan Budidaya Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Tetapi dalam realisasi fisik berdasarkan Indikator Kinerja Utama ada program yang melebihi target dengan tingkat capaian 100%' yaitu Program Pengolahan Hasil Perikanan. Hal lain yang mempengaruhi tidak tercapainya target produksi perikanan ini di karenakan adanya Pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada pengelolaan anggaran dan kurangnya masyarakat untuk melaut oleh karena program pemerintah tentang pembatasan keluar rumah dan beraktivitas serta takut adanya penularan virus ini.

Harapan untuk program pembangunan diprediksikan di tahun 2021 indikator kinerja pelaksanaan program akan mencapai 100% pada Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

b. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Melebihi Target Kinerja.

Pada tahun 2020 capaian program melampaui target adalah Program Pengolahan Hasil Perikanan dari target 1000 ton capaiannya sebesar 1100 ton atau mengalami kenaikan sebesar 110 %. Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan Indikator Kinerja Indeks Tukar Nelayan melampaui target 106.6 dan capaiannya 108.56 dan Indeks Nilai Tukar Pembudidaya dari target 104.10 dan capaiannya 109. untuk Konsumsi Ikan Perkapita dari target 46,3 kg/kapita/tahun mencapai kenaikan sebesar 52.3 kg/kapita/tahun atau 121,5 %

Faktor pendukung capaian program tahun 2020 tersebut antara lain adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sosial, tingkat kesadaran masyarakat untuk berproduksi dalam pengolahan perikanan.

c. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Belum Memenuhi Target Kinerja.

Pada tahun 2020 program yang belum memenuhi target Kinerja adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan target produksi sebesar 442,03 ton serta capaian 374 ton atau tingkat capaian sebesar 85 %. Hal ini disebabkan karena kesulitan pembudidaya untuk mendapatkan benih dan kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap pembudidaya, kurangngnya pemahaman dalam hal penggunaan sarana prasarana budidaya.

Kebijakan dan perumusan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada program dan kegiatan ini adalah sesuai skala prioritas dan berdasarkan kebutuhan harus dilakukan untuk mempertahankan capaian target tersebut antara lain :

- Meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi, pembinaan teknis dan kelembagaan kelompok usaha di bidang perikanan.
- Meningkatkan SDM Pelaku Usaha Perikanan
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana produksi tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran, meningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan serta sarana prasarana Balai Benih Ikan dalam rangka mendukung eksistensi Program Minapolitan Budidaya dan Tangkap di Kabupaten Halmahera Utara dan yang paling utama adalah untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan di Kabupaten Halmahera Utara.

- Mengkaji kembali nilai target capaian indikator kinerja tiap tahun sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi capaian kinerja.
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah (ditambahkan)

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 pada lampiran 1.

Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja program dan kegiatan tersebut didukung dari dana APBD Kabupaten Halmahera Utara baik dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta anggaran APBN melalui tugas pembantuan. Anggaran belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan, sedangkan anggaran belanja langsung meliputi belanja program dan kegiatan.

Pada tahun 2020 anggaran belanja beserta perubahannya mencapai Rp 4.758.273.886,00,- dan realisasi keuangan Rp. 2.884.644.950.,00,- atau 59.78 % dan sisa sebesar Rp 1.849.753.936,00,-. Pada tahun 2020 dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp 2.915.377.650,00,- dengan bulan Realisasinya mencapai Rp 1.076.287.229,- atau 52,64 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dapat dikaji dari Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Pilihan bidang Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Nilai Tukar Nelayan
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

3. Produksi Perikanan
4. Produksi pengolahan hasil perikanan.
5. Konsumsi Ikan perkapita
6. Produksi perikanan komoditi unggulan (Ikan Tuna, cakalang, kerapu, dan nila)

Selain itu kajian indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara berdasar Indikator Kinerja Utama meliputi :

1. Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan
2. Persentase peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
3. Persentase peningkatan produksi perikanan.
4. Persentase peningkatan produksi ikan olahan.
5. Persentase peningkatan Konsumsi ikan perkapita.
6. Persentase peningkatan produksi perikanan komoditi unggulan.

Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama diukur berdasarkan realisasi capaian dibandingkan dengan target. Target tersebut diukur dari jumlah volume peningkatan produksi yang diinginkan dibandingkan dengan volume produksi pada kondisi kinerja awal (tahun ke nol), sehingga realisasi capaian peningkatan produksi juga dibandingkan dengan volume produksi tahun ke nol penghitungan target.

Indikator Kinerja Utama tahun 2022 yang telah disesuaikan yang meliputi indikator kinerja utama dan target kinerja dengan rata-rata capaian di atas 100 % hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dapat dikatakan berhasil. Indikator tersebut meliputi

1) Nilai tukar nelayan rata-rata 108,56
2) Nilai tukar pembudidaya rata-rata 109
3) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tingkat capaian 70.8 %;
4) persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan tingkat capaian 85 %;
5) persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan tingkat capaian 110 %;
6) persentase peningkatan produksi perikanan komoditi unggulan tingkat capaian 135.85 %

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2 lampiran 2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016-2021 yaitu mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran peningkatan produksi, perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun ikan olahan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan,ditunjang dengan tingginya konsumsi ikan perkapita. Peningkatan produksi perikanan ditunjang dengan tingginya konsumsi ikan perkapita.

Ada sebagian kecil kegiatan peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan dalam 1 tahun terakhir cukup signifikan dan memenuhi target kinerja. Tercapainya target kinerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dan sebagai upaya dalam mendukung peran peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara poin ke empat yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara, yaitu melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa harus mengabaikan sektor-sektor usaha lain yang potensial bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 sebagai rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Hal tersebut

merupakan tindak lanjut dari permasalahan dan isu-isu di lingkup kelautan dan perikanan yang semakin kritis dan dinamis.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk sumberdaya pesisir di beberapa wilayah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya kelautan dan perikanan akibat kegiatan eksploitasi yang berlebihan dan penagkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti pemboman ikn dan potasium. Pada sektor perikanan tangkap pada perairan kepulauan atau pada jalur IA (0-2) mil laut kuantitas produksi diindikasikan mulai berkurang, sehingga posisi fishing ground semakin jauh sekitar 4 mil laut mengakibatkan waktu trip penangkapan dan biaya operasional nelayan bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas jumlah armada tangkap di atas 3 GT, memasang rumpon di beberapa titik sebagai lokasi fishing ground baru. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian dan mempertahankan fishing ground yang ada, perlu dilakukan sosialissasi untuk memberikan pemahaman mengenai kelestarian sumberdaya laut dan pesisir dan meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk Peningkatan produksi budidaya harus ditunjang oleh ketersediaan benih dan kualitas benih yang baik dan bersertifikat serta kebutuhan pakan ikan yang murah. Saat ini ketersediaan benih bersertifikat dan induk ikan unggul di Kabupaten Halmahera Utara masih terbatas. Ketersediaan benih dan induk ikan baik kualitas maupun kuantitasnya yang menunjang keberhasilan usaha budidaya, oleh karena itu permasalahan benih dan induk ikan serta pakan ikan menjadi sangat penting. Benih ikan yang bermutu dihasilkan oleh induk yang unggul sesuai Standar Nasional Indonesia dan penanganan yang sesuai dengan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih yang berkualitas maka dilakukan sertifikasi benih ikan untuk Hatchery dan Balai Benih Ikan (BBI). Selain itu untuk meningkatkan kualitas produksi budidaya juga dilakukan pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Program pembangunan perikanan budidaya sudah diarahkan dalam program pengembangan kawasan Minapolitan budidaya yang tersentral. di Kabupaten Halmahera Utara pengembangan kawasan mina politan belum di terapkan sehingga proses percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis

pemberdayaan masyarakat akan cepat meningkat, sehingga perlu dilakukan kajian kawasan pengembangan minapolitan.

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Utara sudah tergolong tinggi. Ini ditandai dengan terserapnya hasil produksi perikanan dalam pasar lokal. Peningkatan konsumsi ikan akan berperan sangat strategis bagi pendorong produksi perikanan yang diharapkan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan asupan protein bersumber dari ikan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan.
2. Masih maraknya penangkapan ikan dengan cara destructive
3. Terbatasnya jumlah petugas teknis lapangan dan penyuluh perikanan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara (17 kecamatan).
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan sehingga kualitas kelompok usaha secara administratif belum optimal.
5. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan pada umumnya menyebabkan kurangnya pemahaman dan adopsi informasi teknologi perikanan.
6. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan dalam memperlakukan hasil produksi sebagai upaya peningkatan kualitas sehingga bernilai jual tinggi dan memenuhi standar ekspor.
7. Kurangnya promosi mengenai produk asal ikan dan kurang berkembangnya jaringan pemasaran yang ada.
8. Upaya peningkatan usaha sektor perikanan yang tidak didukung oleh akses layanan permodalan yang sesuai kemampuan pelaku usaha perikanan.

9. Adanya Pandemi Covid 19 yang mewabah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 2020

b. Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kondisi iklim (cuaca) yang tidak menentu dan sulit diprediksi, mempengaruhi produktivitas usaha penangkapan ikan.
2. Wilayah pesisir Kabupaten Halmahera Utara khususnya daerah kecamatan loloda utara dan loloda kepulauan merupakan perairan laut yang memiliki gelombang yang tinggi dan rawan terhadap bencana alam laut.
3. Infrastruktur jalan yang kurang memadai terutama jalan produksi di wilayah pesisir galela Utara dan loloda utara sehingga kelancaran arus kegiatan perekonomian belum optimal.
4. Sebagian besar rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan merupakan rumah tangga dengan kategori miskin.
5. Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih belum optimal akibat kurang maksimalnya pemetaan potensi pesisir, kelautan dan perikanan.

c. Peluang

Peluang dalam mendukung peningkatan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya lahan budidaya ikan yang potensial, luas perairan laut yang besar mendukung untuk pengembangan kegiatan perekonomian sektor kelautan dan perikanan.
2. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
3. Potensi sumberdaya perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
4. Permintaan pasar akan produk perikanan yang berkualitas semakin meningkat.
5. Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai di Wosia cukup memadai dan strategis.

6. Pemutusan penyebaran virus COVID 19 dengan adanya pemberian vaksin, dan mengikuti protokoler kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2022 antara lain adalah sebagai berikut :

a. Guna meningkatkan perkembangan produksi perikanan dalam rangka pencapaian target maka perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana di bidang kelautan dan perikanan serta peningkatan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.
b. Meningkatkan kualitas produk asal ikan baik segar maupun olahan sehingga daya saing produk asal ikan dapat memenuhi standar nasional dan berkualitas ekspor.
c. Untuk memenuhi permintaan benih ikan dan ikan konsumsi melalui peningkatan jumlah induk unggul dan peningkatan sarana prasarana produksi budidaya ikan.
d. Dalam rangka mengatasi terbatasnya modal usaha diperlukan fasilitasi akses modal usaha melalui lembaga-lembaga ekonomi pedesaan dan dukungan lembaga-lembaga keuangan serta fasilitasi peningkatan jaminan terhadap modal usaha melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya (SEHAT) .
e. Sebagai upaya peningkatan pelayanan oleh aparatur diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan peningkatan sarana prasarana aparatur.
f. Rencana program dan kegiatan disusun atas pertimbangan harus sejalan dan searah dengan visi dan misi kepala daerah serta kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, menjaring kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, sebagai jawaban atas perkembangan dan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Program pilihan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah meliputi :

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
5) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
7) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan Program
8) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan tugas lainnya

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2020 terdapat perbedaan antara program pilihan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan pilihan yang direncanakan.

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan hasil analisis kebutuhan antara lain meliputi program dan kegiatan pada program rutin dan pilihan tidak terdapat perubahan, tetapi perubahan terdapat pada alokasi besaran dana. Perbedaan jumlah dana tersebut disebabkan adanya penyesuaian rancangan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Pada Tahun 2020 hanya ada 4 program prioritas yang dilaksanakan yaitu, Program Pengembagan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Periaknan dan Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya.

Secara rinci perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3. pada lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, penjaringan kebutuhan masyarakat melalui acara pertemuan dan sosialisasi, serta melalui surat dan proposal yang dikirimkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Usulan kegiatan masyarakat tahun 2022 pada umumnya selaras dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program yang direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Usulan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bantuan benih ikan, Induk Ikan dan sarana prasarana budidaya merupakan program dalam rangka memfasilitasi pengembangan usaha budidaya ikan konsumsi. Bantuan benih dan sarana prasarana budidaya ikan akan dialokasikan pada wilayah yang berpotensi dan sesuai dengan komoditas yang diunggulkan di wilayah itu. Disamping itu volume disesuaikan dengan potensi lahan budidaya dan ketersediaan benih ikan.
b. Pelatihan/pembinaan teknis budidaya ikan dan teknis penanganan ikan pasca panen baik segar maupun olahan ikan yang dilaksanakan rutin sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, sehingga usulan pelatihan teknis menjadi prioritas utama yang direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.
d. Sarana Prasarana dan alat bantu penangkapan ikan pada tahun 2022 akan dialokasikan sarana prasarana tersebut dengan kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan nelayan.
e. Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran pada tahun 2022 yang dialokasikan untuk pengembangan dan penguatan kelompok sasaran di tahun sebelumnya.
f. Penguatan kelembagaan kelompok (Pokdakan, KUB dan Poklashar) akan dialokasikan dengan prioritas penumbuhan koperasi perikanan.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan dari masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4. pada lampiran 4.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional(Nawa Cita), yaitu :

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikana adalah "kemaritiman dan kelautan" dan "kedaulatan pangan". Selanjutnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu "Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 adalah:

1) Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke1 dan ke 4, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kedaulatan.
2) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan keberlanjutan.
3) Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kesejahteraan.

4) Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang kompeten dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang inovatif. Arah kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
5) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Arah kebijakan ini ditetapkan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi.

Selaras dengan agenda prioritas nasional, prioritas pembangunan di Provinsi Maluku Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara dengan visi mewujudkan " MALUT sebagai Lumbung Ikan Nasional yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan " dengan motto " Dari Laut Kita Bangun MALUT " serta penyatuan komitmen bersama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk " Mewujudkan Sektor Kelautan Dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional ". Berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional serta visi dan misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dari identifikasi permasalahan yang timbul maka ditentukan isu strategis kelautan dan perikanan yang meliputi :

1. Produksi Perikanan Maluku Utara sebagian besar di bawa ke luar daerah dan tidak terserap di pasar local menyebabkan kontribusi sector ini terhadap PDRB masih sangat minim;
2. Kuantitas dan Kualitas SDM Keluatan dan Perikanan belum optimal;
3. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan didorong melalui berbagai upaya, antara lain :

a. Perubahan mainset nelayan, pembudidaya dan akses peningkatan kemampuan teknis dan permodalan untuk peningkatan daya saing daerah;
b. Peningkatan perikanan skala usaha masyarakat untuk peningktan pendapatan;
c. Mendorong penempatan komoditas bernilai ekonomis tinggi serta mengembangkan produk bernilai tambah;

4. Produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya;
5. Peningkatan eksport dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;
6. Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) sekaligus optimalisasi pengawasannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas ke-4 pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, yaitu : "*Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara, yaitu melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa harus mengabaikan sektor-sektor usaha lain yang potensial bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat*" maka ditetapkan tujuan dan sasaran beserta target indicator sasaran Rencana kerja tahun 2022 beserta prognosis tahun berikutnya.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu "*Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang professional, mandiri, unggul dan Berdaya Saing*"" yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam 1 (satu) program rutin yang dijabarkan dalam 5 program pilihan yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

(ii) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

(iii) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

(iv) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

(v) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

(vi) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(vii) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(viii) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

(ix) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

(x) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

(xi) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

(xii) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

(xiii) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

(xiv) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(xv) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(xvi) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(xvii) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(xviii) Fasilitasi Kunjungan Tamu

(xix) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(xx) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(xxi) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(xxii) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(xxiii) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(xxiv) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

7. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

(xxv) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

(xxvi) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

8. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

(xxvii) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

(xxviii) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

9. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxix) Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

10. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

(xxx) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

(xxxi) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

11. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

(xxxii) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxxiii) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxxiv) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxxv) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

12. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

(xxxvi) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

(xxxvii) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

13. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

(xxxviii) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

14. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

(xxxix) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

15. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

(xl) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok sasaran dari program-program Dinas Kelautan dan Perikanan adalah nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar/pedagang ikan yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Pagu indikatif yang direncanakan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 sebesar Rp. 5.709.357.691 yang terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 disampaikan pada tabel 3.1 pada lampiran 5.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022	PRIORITAS
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan. administrasi persuratan dan kearsipan**	**1 Tahun**	**5.565.367.850**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 bln	289.345.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 bln	2.348.401.402	

	Administrasi Kepegawaian Daerah		12 bln	52.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bln	218.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln	165.861.511	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln	120.859.937	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**1 Tahun**	2.864.300.000	**PRIORITAS**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kegiatan/Paket	2.819.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan	45.300.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**2.496.649.544**	**PRIORITAS**
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Tahun	10.000.000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		1 kali	45.300.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Kegiatan/ Paket	**2.441.349.544**	

4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**20.000.000**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		1 kali	10.000.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 kali	10.000.000	
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**319.300.000**	**PRIORITAS**
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		1 tahun	20.000.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		3 Kegiatan	108.300.000	
	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pngolahan ikan dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota		Paket	191.000.000	
	Jumlah			11.265.617.394	

BAB V

PENUTUP

Kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dengan program - program yang dilaksanakan adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Progran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanandan rogrma Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Perencanaan penganggaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 mengacu pada pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan anggaran program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2022.

Plt Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN HALMAHERA UTARA

Victor O Mangimbulude, ST
Pembina / IVa
NIP. 19721021 200212 1 003

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020

NO	KODE-KODE		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021		REALISASI TARGETKINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020						TARGET PROGRAM KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2021		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2020	
									TARGET RENJA 2020		REALISASI RENJA 2020		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	1		2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)	
	1		2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			**Belanja Tidak Langsung**		**100%**	**100%**	**80,92**											
			1 Belanja Pegawai	tersedianya belanja pegawai			100	1.867.896.236	100%	**1.842.896.236**	85,87	**1.768.360.721**		96			3.636.256.957	
2	**3.01 . 3.01.01.01 . 01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%/bln)**	**100%**		**100%**		**95**	**406.613.000**	**85,865**	**214.050.979**	**90,38%**	53			214.050.979	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 01		1 Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah registrasi surat masuk dan keluar (surat))	10.000	38.217.775	980	25.553.000	100	26.965.000	12	21.110.000	**12,00%**	78			46.663.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 02		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (bln)	60	512.310.000	12	46.268.051	75	96.200.000	9	43.399.158	**12,00%**	45			89.667.209	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 06		3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (bulan)	60	699.128.000	8	124.010.917	75	121.164.000	9	55.737.821	**12,00%**	46			179.748.738	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 08		4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa Kebersihan Kantor (orang/bln)	60	267.696.580	12	44.967.000	100	45.057.000	12	35.414.000	**12,00%**	79			80.381.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 09		5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (bln)	60	69.948.400	5	1.500.000	100	10.500.000	12	6.750.000	**12,00%**	64			8.250.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 10		6 Penyediaan alat tulis kantor	jumlah pengadaan ATK (paket)	5	61.134.000	1	22.972.500	100	30.257.000	12	20.597.000	**12,00%**	68			43.569.500	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 11		7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan Cetakan dan Penggandaan (paket)	5	35.170.000	1	819.400	100	8.000.000	12	3.068.000	**12,00%**	38			3.887.400	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 12		8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	5	9.840.000	1	675.000	100	2.000.000	12	1.325.000	**12,00%**	66			2.000.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 15		10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan PerUUan (buah)	1.500	83.084.000	300	5.550.000	12	12.920.000	12	3.500.000	**100,00%**	27			9.050.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 17		11 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (pak)	3.000	57.720.000	600	3.784.000	100	3.600.000	12	3.300.000	**12,00%**	92			7.084.000	

NO	KODE-KODE		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021		REALISASI TARGETKINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020						TARGET PROGRAM KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2021		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2020	
									TARGET RENJA 2020		REALISASI RENJA 2020		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	1		2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)	
	1		2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.01 . 3.01.01.01 . 01 . 18	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	1.253.900.000	20	85.062.000	100	49.950.000	3	19.850.000	**3,00%**	40			104.912.000	
3	**3.01 . 3.01.01.01 . 02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)**	**100**		**95,24**		**25**	6.732.000	**100**	**5.170.000**	**400,00%**	77			5.170.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 02 . 22	2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan bangunan kantor (bln)	60	111.325.800			100	6.732.000	12	5.170.000	**12,00%**	77			5.170.000	
4	**3.01 . 3.01.01.01 . 06**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Tersedianya informasi kinerja dan keuangan (%)	**100**	**100**			100	6.732.000	12	0	**12,00%**	-			-	
	3.01 . 3.01.01.01 . 06 . 01	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)	35	83.055.000	7	4.050.000,00	100	11.314.650	12	0	**12,00%**	-			4.050.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 06 . 04	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen)	5	37.907.520	1	6.720.000	100	4.135.000	12	22.561.000	**12,00%**	5			29.281.000	
	3.01 . 3.01.01.01 . 06 . 06	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	60.650.000	1	153.820.000	**100**	55.061.000	**109**	22.561.000	**109,00%**	0			176.381.000	
7	3.01. 3.01.01.01 . 20		**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**	**(748 ton)**		235 ton	251,99 ton	100	**1.329.424.650**	13	**333.934.250**	**13,00%**	0			#VALUE!	
	3.01. 3.01.01.01 . 20 . 01	1	Pengembangan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan(Peningkatan Sarana Prasarana Pembudidaya)	Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan (kel)	10 pkt	2.458.000.000	9 pkt	417.172.900	13	895.949.650	13	242.811.250	**100,00%**	0			659.984.150	
																	-	
	3.01. 3.01.01.01 . 20 . 02	2	Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut	Jumlah Operasional Perbenihan Ikan Air Laut	60	1.759.274.350	12	180.560.000	12	97.360.000	12	91.123.000	**100,00%**	1			271.683.000	
	3.01. 3.01.01.01 . 20 . 15	3	Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri	Tersedianya operasional UPTD BBIL Kusuri (bln)	60	1.525.916.150	12	338.501.000	12	336.115.000	12	248.568.000	**100,00%**				587.069.000	
					1.000.000												-	
	3.01. 3.01.01.01 . 21		**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**	**21.208**		15.110		33	967.500.000	**23.364**	252.000.000	**708**	0			252.000.000	
8	3.01. 3.01.01.01 . 21. 01	1	Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Kapal perikanan(unit)	72	7.858.306.432	13	992.781.550	10	967.500.000	10	252.000.000	**100,00%**	0			1.244.781.550	
				Jumlah Mesin Kapal (unit)	105		13										-	
				Jumlah API (Paket)	45		-										-	

NO	KODE-KODE		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021		REALISASI TARGETKINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020						TARGET PROGRAM KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2021		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2020	
									TARGET RENJA 2020		REALISASI RENJA 2020		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	1		2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)	
	1		2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah ABPI (Paket)		22		-										-	
	3.01. 3.01.01.01 . 23		**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan**	**100 % (1014 ton)**				10	0	1100		**110**				-	
9	3.01. 3.01.01.01 . 23 . 01	1	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan	Jumlah perlatan pemasaran sederhana (paket)	4	1.174.000.000	7	12.500.000	1	**3.000.000**	0	-	**0,00%**	-			12.500.000	
	3.01. 3.01.01.01 . 23 . 02	2	Sosialisasi 'Gemar Ikan" dan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan	Jumlah Keg. Sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan (keg)	15	530.000.000	1	60.000.000	1	108.997.350	0		**0,00%**	-			60.000.000	
	3.01 3.01.01.01 . 29 .		**Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya**	**Presentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya**	**60**				100	**131.597.350**	0	-	**0,00%**	-			-	
11	3.01 3.01.01.01 . 29 . 01	1	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Pengganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Indeks efektivitas kebijakan	35	1.174.000.000	7	118.378.000	3	108.997.350	0		**0,00%**				118.378.000	
	3.01 3.01.01.01 . 29 . 03	2	Pengembangan Data Statistik dan Penyediaan Informasi Perikanan	Jumlah data statistik Tangkap, budidaya dan P2HP (dokumen)	5	267.500.000	1	7.500.000	1	22.600.000	0		**0,00%**				7.500.000	

Tobelo, Februari 2022
PLT Kepala Dinas

Viktor Mangimbulude, ST
Pembina /IVa.
NIP.197210212002121005

Lampiran 2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara

NO	INDIKATOR	STANDAR SPM NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			(PP-6/'08)	Tahun 2018 (tahun n-2)	Tahun 2019 (tahun n-1)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-1)	Tahun 2020 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan**											
a	Rata-rata Nilai tukar nelayan (pertahun)	-	Perbandingan faktor produksi nelayan dengan produk (>100)	108,20	108,30	106,60	108,40	108,20	108,56	108,30		
b	Rata-rata Nilai tukar Pembudidaya (pertahun)	-	Perbandingan faktor produksi pembudidaya dengan produk (>100)	103,80	104,10	104,10	104,30	103,80	109,00	104,10		
II	**Peningkatan Produksi Perikanan**	-	Total produksi perikanan	19.264,00	20.285,00	30.442,02	21.830,00	19.264,00	23.738,00	20.285,00		
a	Jumlah produksi Perikanan Tangkap (ton)		Jumlah produksi perikanan tagkap dalam 1 tahun	18.900,00	19.802,00	30.000,00	21.208,00	18.900,00	23.364,00	19.802,00		
b	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)		Jumlah produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun	364,00	483,00	442,03	622,00	364,00	374,00	483,00		
III	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton)		Jumlah produksi pengolahan hasil ikan dalam 1 tahun	91,70	93,50	1.000,00	95,40	91,70	1.100,00	93,50		
IV	**konsumsi ikan perkapita (kg/kapita/thn)**	-	Jumlah konsumsi ikan, udang dan ikan dalam olahan lainnya	46,22	46,42	46,30	46,42	46,22	52,40	46,42		
IV	**Produksi komoditi Unggulan**	-	Total Jumlah komoditi unggulan 1 tahun	1.506,00	1.579,00	9.128,35	1.614,00	1.518,00	10.379,24	1.587,00		
a	Ikan Tuna (ton)		Jumlah produksi tuna dalam 1 tahun	500,00	550,00	5.906,69	575,00	500,00	6.284,93	550,00		
b	Ikan Cakalang (ton)		Jumlah produksi cakalang dalam 1 tahun	630,00	640,00	2.988,09	650,00	630,00	3.861,08	640,00		
c	Ikan Nila (ton)		Jumlah produksi nila dalam 1 tahun	372,00	384,00	233,23	384,00	384,00	233,23	392,00		
d	Ikan Kerapu (ton)		Jumlah produksi kerapu dalam 1 tahun	4,00	5,00	0,34	5,00	4,00	-	5,00		

Tobelo, Februari 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara

Victor O Mangimbulude, ST
Pembina /IVa..
NIP.197210212002121005

Lampiran 3

Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN thn 2021	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA 2021	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	*2*	*3*	*4*	5	6	7		8	9	*10*	11
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DKP	**Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja**	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	**Persentase implementasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah**	5 dokumen		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase implementasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah**	5 dokumen		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	4 dokumen	47.243.827	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	4 dokumen		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP	Tersedianya jumlah Dokumen RKA SKPD	2 dokumen	1.999.999	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya jumlah Dokumen RKA SKPD	2 dokumen		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 dokumen		
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DKP	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	2 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen		
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	DKP	Tersedianya Dokumen Peerubahan DPA-SKPD	1 dokumen	999.950	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD		Tersedianya Dokumen Peerubahan DPA- SKPD	1 dokumen		
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DKP	Tersususnnya dokumen Renja, LKj,RKA, DPA,LPPD	5 dokumen	8.953.166	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Tersususnnya dokumen Renja, LKj,RKA, DPA,LPPD	5 dokumen		

	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	Tersedianya Laporan kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	202.717.397	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DKP	**Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan**			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	**Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia**	12 Bln%	2.542.626.589	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	12 Bln%		
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	Tersedianya Lapoiran Keuangan Akhir Tahun		1.999.849	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Lapoiran Keuangan Akhir Tahun			
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKP	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 Bln	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 Bln		
	3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP	Tesdainya Laporan Prognosiis Realisasi Anggaran	12 Bln	1.340.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tesdainya Laporan Prognosiis Realisasi Anggaran	12 Bln		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		DKP	**Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 Bln**		**0**		**Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 Bln**		
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	DKP	Tersedianyan Pakaian Dinas	35	33.733.302	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya		Tersedianyan Pakaian Dinas	35		
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DKP	Terlaksananya Bimtek	2 kali	34.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Terlaksananya Bimtek	2 kali		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		DKP	**Terlaksananya Pelayanann administrasi umum perangkat daerah**					Terlaksananya Pelayanann administrasi umum perangkat daerah			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah Peralatan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	12 bln	2.499.992	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Peralatan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	12 bln		
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	12 bln	4.499.831	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	12 bln		
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKP	jumlah penyediaan Cetakan dan Penggandaan (paket)	12 bln	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah penyediaan Cetakan dan Penggandaan (paket)	12 bln		
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan PerUUan (buah)	12 bln	14.116.667	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan PerUUan (buah)	12 bln		

	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 bln	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 bln		
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta,Bogor,TTE	T'erselenggaranya Rapat2 rapat Koordinasi	16 OK	144.450.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		T'erselenggaranya Rapat2 rapat Koordinasi	16 OK		
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DKP	**Tersedianya Jasa Penunjang Daerah**	**16 OK**		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DKP**	**Tersedianya Jasa Penunjang Daerah**	16 OK		
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	jumlah registrasi surat masuk dan keluar (surat))	12 bln	60.340.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**DKP**	jumlah registrasi surat masuk dan keluar (surat))	12 bln		
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKP	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (bln)	12 bln	69.012.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**DKP**	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (bln)	12 bln		
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	DKP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	12 bln	3.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	**DKP**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	12 bln		
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP	Jumlah jasa yang diberikan	12 bln	31.335.821	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**DKP**	Jumlah jasa yang diberikan	12 bln		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DKP	**Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah**	**1 thn**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DKP**	Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah	1 thn		
	1	Penyediaan Jasa Pemneliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	DKP	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (bulan)	15 izin Pajak	120.856.950	Penyediaan Jasa Pemneliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	**DKP**	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (bulan)	15 izin Pajak		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**	33.000		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**DKP**	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)	33.000		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kab Halut	**Jumlah Pemenuhan layanan perkantoran lingkup sumber daya kelautan**			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**DKP**	Jumlah Pemenuhan layanan perkantoran lingkup sumber daya kelautan			
	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab Halut	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 dokumen	15.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	**DKP**	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 dokumen		
	2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab Halut	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun	10 kelompok	2.112.500.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	**DKP**	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun	10 kelompok		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab Halut	**Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Nelayan**			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab Halut	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan	1 kali	20.640.299	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			1 kali		

	2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jkrta/TTE	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2 kgiatan	29.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			2 kgiatan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Halut**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**	**450**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**DKP**	Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)	450		
	Penerbitan izin usaha Perikanan di Bidang			**Alokasi izin yang di Terbitkan**	IUP		**Penerbitan izin usaha Perikanan di Bidang**			IUP		
		Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Halut	Jumlah alokasi izin yang diterbitkan	20 izin	8.999.847	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20 izin		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			**Peningkatan pengetahuan masyarakat pembudidaya**			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jkrta-TTE	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2 Kegiatan	40.000.000				2 Kegiatan		
3		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksanaya Pendampingan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	7.999.151				30 Kelompok		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			**Terkelolanya Budidaya Perikanan**			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Data dan Informasi Pembudi daya Ikan	**1 dokumen (database)**	10.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen (database)			

	2	Penyediaan Prasrana Pembudidayaan ikan dalam satu daerahkabupaten kota		Tersedianya bantuan Sarpras Budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang prdoduksi dan usaha	kelompok	1.577.333.750	Penyediaan Prasrana Pembudidayaan ikan dalam satu daerahkabupaten kota			kelompok		
	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Operasional BBI Kusuri	12 bulan	460.114.871	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 bulan		
	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pemantau penyakit ikan	1 kali	4.999.664	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**DKP**	Terlaksananya pemantau penyakit ikan	1 kali	12 bulan	
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan SDKP**			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**DKP**	Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan SDKP		1 kali	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		**Jumlah pemantauan dan pengawasan pada usaha perikanan.tangkap dikabupaten/kota**	**Kegiatan**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**			Kegiatan		
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan usaha perikanan tangkap di Kabupaten kota	1 kali	5.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			1 kali		
	1	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan usaha perikanan budidaya di Kabupaten kota	1 kali	5.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	**DKP**	Jumlah pemantauan dan pengawasan usaha perikanan budidaya di Kabupaten kota	1 kali	1 kali	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**DKP**	Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)		-	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			**Terlaksananya Penerbitan izin Usaha**	IUP		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**DKP**	Terlaksananya Penerbitan izin Usaha	IUP	IUP	

		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah alokas iizin yang diterbitkan	25 izin	9.999.488	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**DKP**	Jumlah alokas iizin yang diterbitkan	25 izin	25 izin	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			**Terjaminnya Mutu dan kualitas hasil ikan**			**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**DKP**	**Terjaminnya Mutu dan kualitas hasil ikan**		-	
5		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahan baku Industri Pengolahan Ikan	25 kelompok	44.000.000		**DKP**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahan baku Industri Pengolahan Ikan	25 kelompok	25 kelompok	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			**Tersedianya sarana prasarana pengadaan pemasaran penyimpanan ikan yang dibangun, dan Jumlah menu inovasi berbahan baku ikan**	Keg		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**DKP**	Tersedianya sarana prasarana pengadaan pemasaran penyimpanan ikan yang dibangun, dan Jumlah menu inovasi berbahan baku ikan	Keg	Keg	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sarana prasarana pengadaan pemasaran penyimpanan ikan yang dibangun, dan Jumlah menu inovasi berbahan baku ikan	Paket/ kegiatan	409.999.281	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**DKP**	Tersedianya sarana prasarana pengadaan pemasaran penyimpanan ikan yang dibangun, dan Jumlah menu inovasi berbahan baku ikan	Paket/kegiatan	Paket/kegiatan	

Tobelo, Februari 2022
PLT. Kepala Dinas

Victor O Mangimbulude, M.Si
Pembina /IVa..
NIP.197210212002121005

Lampiran 4

Tabel 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	PROGRAM KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	Catatan Penting (Prioritas)
1	2		3	4	5	6
I	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**	**10**	
	1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Halut	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 izin	
	2	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kec Galela, Galela Selatan, Kao Teluk, Kao, Kaio Utara	Peningkatan produksi budidaya ikan kecil	30 klmpok	
	3	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Kec Tobelo Barat, Kao Barat, KAoTeluk, Galela,Galela Selatan,	Peningkatan produksi budidaya perikanan		
II	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**			**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**		
	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec Tobelo Selatan, Lploda Utara,Loloda Kepulauan, Kao Teluk, galela Utara, Tobelo, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Kao, Kao Utara	jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data SDI	
	2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	13 Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 kelompok	
III	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**					
	1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab Halut	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	30 izin	

	2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab Halut	Indeks efektivitas pembinaan Mutu dan Keamanan hasil perikanan	30 kelompok	
	3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab HAlUT	Tersedianya dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	

Tobelo, Februari 2022

PLT. Kepala Dinas

Victor D Mangimbulude, ST

PEMBINA / IVa

NIP. 197210212002121005

Lampiran 5

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode Rekening							Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
									Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
											Sumber Dana	APBD II	APBD I	APBN		
3							**Urusan Pilihan**									
	25						**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
3	**25**	**1**			**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase capaian kinerja perangkat daerah sesuai Laporan Kinerja (LKj)		100%		5.565.367.850				6.121.904.635
3	25	1	02.01				**Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**289.345.000**				318.279.500
3	25	1	02.01			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	DKP	3 Dokumen	DAU	139.345.000				153.279.500
3	25	1	02.01	02		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya jumlah Dokumen RKA SKPD	DKP	1 Dokumen	DAU	2.000.000				2.200.000
3	25	1	02.01	03		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	DKP	1 Dokumen	DAU	1.000.000				1.100.000
3	25	1	02.01	04		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	DKP	1 Dokumen	DAU	1.000.000				1.100.000
3	25	1	02.01	5		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKDP	Tersedianya Dokumen Peerubahan DPA- SKPD	DKP	1 Dokumen	DAU	1.000.000				1.100.000
3	25	1	02.01	6		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)	DKP	1 Laporan	DAU	12.854.000				14.139.400
3	25	1	02.01	7		7	Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Tersedianya Laporan kinerja Perangkat Daerah	DKP	16 Laporan	DAU	132.146.000				145.360.600

3	25	1	02.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		**100%**		2.348.401.402				2.583.241.542
3	**25**	**1**	**02.02**	**1**	**1**		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	12 Bln		2.343.061.402				2.577.367.542
3	25	1	02.02	05		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	1 Laporan	DAU	2.000.000				2.200.000
3	25	1	02.02	07		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKP	18 Laporan	DAU	2.000.000				2.200.000
3	25	1	02.02	08		3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP	1 Laporan	DAU	1.340.000				1.474.000
3	25	1	02.05		**3**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			DAU	**52.500.000**				57.750.000
3	25	1	02.05	2		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DKP	28 Paket	DAU	17.500.000				19.250.000
3	25	1	02.05	11		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek	Mdo-Jawa	2 OK	DAU	35.000.000				38.500.000
3	25	1	02.06		**4**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			DAU	**218.400.000**				240.240.000
3	25	1	02.06	1		1	Penyediaanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKP	16 Item	DAU	2.500.000				2.750.000
3	25	1	02.06	2		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	1 Paket	DAU	1.000.000				1.100.000

3	25	1	02.06	5		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKP	12 Paket	DAU	12.000.000				13.200.000
3	25	1	02.06	6		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKP	12 Dokumen	DAU	14.200.000				15.620.000
3	25	1	02.06	8		5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	24 Laporan	DAU	6.000.000				6.600.000
3	25	1	02.06	9		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP	16 OK	DAU	182.700.000				200.970.000
3	**25**	**1**	**02.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.535.861.511**				2.789.447.662
3	25	1	02.08	1		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	12 bln	DAU	60.339.674				66.373.641
3	25	1	02.08	2		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKP	12 Laporan	DAU	72.000.000				79.200.000
3	25	1	02.08	3		3	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	6 Laporan	DAU	3.000.000				3.300.000
3	25	1	02.08	4		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKP	12 Laporan	DAU	30.521.837				33.574.021
3	25	1	02.09	03		5	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKP	1 Unit		2.370.000.000				
3	25	1	02.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah**				**120.859.937**				132.945.931

3	25	1	02.09	2		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKP	12 bln		120.859.937				132.945.931
3	**25**	**3**			**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**		26.737		**2.864.300.000**	**150.000.000**	**150.000.000**		**3.150.730.000**
3	25	3	02.01			**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun**		**100%**		**2.819.000.000**				3.100.900.000
3	25	3	02.01	1		1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	DKP	1 dokumen	DAU	10.000.000				11.000.000
3	25	3	02.01	3		2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	DKP	125 Paket	DAK	2.809.000.000				3.089.900.000
3	25	3	02.02			**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemberdayaan nelayan kecil di daerah**		**100%**		**45.300.000**				49.830.000
3	25	3	02.02	1		1	Pengembangan Kapasitas Nelayan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan	DKP	1 kali	DAU	20.000.000	150.000.000	150.000.000		22.000.000
3	25	3	02.02	3		2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP	2 Kegiatan	DAU	25.300.000				27.830.000
3	**25**	**4**			**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**		**431,7**		**2.496.649.544**	150.000.000	150.000.000		**2.746.314.498**
3	25	4	02.01			**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase izin usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi pelaku usaha pembudidaya ikan dlm setahun**		**100%**		**10.000.000**				11.000.000

3	25	4	02.01	2		1	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	12 Rekomendasi	DAU	10.000.000				11.000.000
3	25	4	02.02			**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**		**Persentase upaya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil di daerah**				**45.300.000**				49.830.000
3	25	4	02.02	3		1	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	DKP	10 Kelompok	DAU	25.300.000	150.000.000	150.000.000		27.830.000
3	25	4	02.02	4		2	Pembinaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Tegnologi dan Informasi Serta Penyelanggaran Pendidikan dan Pelatiihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DKP	3 Kelompok	DAU	20.000.000				22.000.000
3	25	4	02.04			**Pengelolaan Pembudidaya Ikan**		**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah Dalam Setahun**		**100%**		**2.441.349.544**				2.685.484.498
3	25	4	02.04	1		1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	2 dokumen	DAU	10.000.000				11.000.000
3	25	4	02.04	2		2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Halut	37 Unit	DAK	2.068.205.500				2.275.026.050
3	25	4	02.04	4		3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	1 Unit	DAU	358.144.044				393.958.448

3	25	4	02.04	4		4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Halut	4 Dokumen	DAU	5.000.000				5.500.000
3	**25**	**4**	**02.05**		**4**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan SDKP**	**DKP**	**2kali**	**DAU**	**20.000.000**				22.000.000
3	25	4	02.05	1		1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota	Halut	4 Dokumen	DAU	10.000.000				11.000.000
3	25	4	02.05	2		2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	DKP	2 Dokumen	DAU	10.000.000				11.000.000
3	**25**	**6**			**5**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	**DKP**	**1393**	**DAU**	**319.300.000**		**300.000.000**		**351.230.000**
3	25	6	02.01			**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Persentase usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan skala mikro / kecil yang memiliki Tanda Daftar Usaha**	DKP	**100%**		**20.000.000**				22.000.000
3	25	6	03.01	1		1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DKP	6 Dokumen	DAU	20.000.000				22.000.000

3	25	6	04.01	1		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah kelompok pengusaha pengolahan dan pemasaran yang dibina dalam hal mutu dan keamanan**	DKP	**100%**		**108.300.000**				119.130.000
3	25	6	05.01	1		1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan terhadap masyarakat pengolah pemasar	DKP	25 kelompok	DAU	108.300.000		300.000.000		119.130.000
3	25	6	06.01			**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahan baku Industri Pengolahan Ikan**	DKP	**Keg**		**191.000.000**	-			210.100.000
3	25	6	07.01	1		1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Tersedianya sarana prasarana pengadaan pemasaran penyimpanan ikan yang dibangun, dan Jumlah menu inovasi berbahan baku ikan	Halut	Paket/ kegiatan	DAU	191.000.000				210.100.000
							Jumlah Belanja Operasional (Pegawai)					**2.343.061.402,00**				
							Jumlah belanja langsung					**8.922.555.992,00**				
							Jumlah					**11.265.617.394,00**	**APBD II**			
													APBD I	**300.000.000**		
													APBN	**600.000.000**		
													DAU	**6.388.411.894,00**		
													DAK	**4.877.205.500**		
							Jumlah Total					**9.822.555.992,00**	**APBD I, II dan APBN**			

Tobelo, Maret 2022

PLT. Kepala Dinas

Victor C. Mangimbulude, S.T

PEMBINA / IVa

NIP. 19721021 200212 1 005